

UNES Journal of Scientech Research

Volume 2, Issue 1, June 2017

P-ISSN 2528 5556

E-ISSN 2528 6226

Open Access at: <http://journal.univ-ekasakti-pdg.ac.id>

AKSELERASI PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI DALAM SISTEM PRODUKSI UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN EKONOMI DI INDONESIA

ACCELERATION OF EMPOWERMENT AND IMPROVEMENT OF COMPETENCE IN THE PRODUCTION SYSTEM TO OVERCOME ECONOMIC PROBLEMS IN INDONESIA

Roosganda Elizabeth

Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor. E-mail: roosimanru@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata kunci

akselerasi,
pemberdayaan,
kompetensi,
ekonomi, sistem
produksi

ABSTRAK

Perekonomian Indonesia yang naik-turun mempengaruhi kondisi dan kemajuan kehidupan masyarakat, sehingga pemerintah berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonominya, yang ditempuh pemerintah melalui berbagai kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Beberapa upaya pencapaiannya, seperti: menawarkan berbagai kemudahan (baca: tax holiday) kepada investor asing agar berminat menanamkan modal usahanya, mempromosikan tenaga kerja berkualitas dengan upah terjangkau, menciptakan persaingan sehat antara pengusaha agar meningkatkan efisiensi, dan menyiapkan infrastruktur dan prasarana fisik secara baik. Tulisan ini bertujuan untuk mengemukakan secara komprehensif berbagai kebijakan pemerintah terkait pemberdayaan dan peningkatan kompetensi masyarakat dan sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia dalam upaya mengentaskan dan mengatasi permasalahan perekonomian dan sistem produksi secara berkelanjutan. Di sisi konsep kebijakan pemerintah dalam pembangunan pertanian dan teknologi guna memenuhi kebutuhan konsumen, hendaknya mengarah pada pemerataan pendapatan sehingga lebih memungkinkan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada masa yang akan datang. Industrialisasi dan pengembangan di berbagai sektor melalui berbagai program kebijakan pembangunan merupakan beberapa upaya pemerintah, yang telah dijalankan dalam mengejar dan memacu aktivitas perekonomian di masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Nasional, yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk itu, diperlukan perencanaan pembangunan ekonomi yang terpadu dan padat karya sehingga terjadi perbaikan daya beli masyarakat, serta menciptakan sektor prioritas yang telah di rencanakan sampai batas tertentu sehingga tidak terjadi pemusatan investasi pada sektor industri yang menguntungkan saja. Pembangunan ekonomi yang tumbuh dan dapat menggerakkan roda perekonomian secara dinamis serta dapat meningkatkan kualitas produk yang di hasilkan sehingga bersaing di pasar internasional. Dengan sendirinya kapasitas faktor-faktor produksi tidak di bawah kapasitas normal.

Copyright © 2017 JSR. All rights reserved.

ARTICLE INFO

Keywords:

acceleration, improvement, competence, economic, production systems

ABSTRACT

The ups and downs of Indonesia's economic condition will affect the condition and progress of people's lives, so to make it happen, the government is trying to increase its economic growth, which the government pursues through various policies to promote balanced economic growth. Some of the efforts to achieve this are: offering a variety of facilities (read: tax holiday) to foreign investors in order to be interested in investing their business capital, promoting qualified workers with affordable wages, creating healthy competition among employers in order to increase efficiency, and prepare infrastructure and physical infrastructure well. This paper aims to express comprehensively the various government policies related to the empowerment and improvement of competence of society and natural resources owned by Indonesia in an effort to alleviate and overcome the problems of economy and production system in a sustainable and sustainable. On the side of the concept of government policy in agricultural development and technology to meet consumer needs, it should lead to income distribution so it is more likely to create better economic growth in the future. Industrialization and development in various sectors through various development policy programs are some of the government's efforts, which have been implemented in the pursuit of and spur economic activity in the community and the growth of the national economy, which ultimately can improve the standard of living of the community. Therefore, an integrated and labor-intensive economic development planning (solid use of human resources) is required to improve the purchasing power of the community as a whole, and create priority sectors that have been planned to a certain extent so that there is no centralization of investment in the lucrative industrial sector alone. Economic development that grows and can dynamically move the wheels of the economy and can improve the quality of products produced so as to compete in the international market. By itself the capacity of the factors of production is expected to never be below normal capacity.

Copyright © 2017 JSR. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia dalam aktivitas kehidupan sehari-hari banyak menghadapi permasalahan ekonomi dan sistem produksi, akibat tidak seimbangnya jumlah kebutuhan dengan jumlah produksi (barang dan jasa) yang sanggup disediakan oleh produsen. Pengertian analisis ekonomi adalah merupakan suatu cara untuk memenuhi kebutuhan dengan faktor-faktor produksi (lahan, input sarana produksi, SDA, SDM, dan sebagainya) yang tersedia dan terbatas jumlahnya seefektif dan seefisien mungkin. Tanah (lahan pertanian, perkebunan dan hutan) dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya maupun di atasnya, serta sumberdaya alam lainnya seperti barang tambang (minyak mentah, batubara, timah,

emas dan lainnya) dapat diusahakan sampai berproduksi dan memberikan kontribusi tambahan pendapatan bagi masyarakat (Elizabeth, 2014)

Percepatan pertumbuhan penduduk yang melebihi pertumbuhan produksi (dimana pertumbuhan penduduk bersifat deret ukur sementara pertumbuhan produksi pangan sesuai deret hitung), dapat diantisipasi dengan pendekatan sistem pertanian berkelanjutan dengan pemanfaatan potensi sumberdaya lokal. Tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi bukan saja berdasarkan jumlah penduduk, tetapi juga harus memperhitungkan pengetahuan atau skill (keahlian, kompetensi) yang dimiliki. Dengan demikian, tenaga kerja yang dimaksudkan sudah termasuk kompetensi (kemampuan) dan berklasifikasi (Elizabeth, 2008). Keahlian dalam teknologi pertanian termasuk sebagai tenaga kerja pertanian, sehingga makin disadari bahwa keahlian tersebut merupakan hal istimewa yang dimiliki petani dalam alih teknologi yang dibutuhkan pada saat sekarang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman. Keahlian pelaku pertanian fungsinya adalah mengorganisir dan menggabungkan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan kebutuhan pangan hasil pertanian secara efisien dan menguntungkan.

Untuk menghasilkan barang dan jasa, jenis peralatan yang dimaksud adalah berbagai jenis mesin untuk menghasilkan produk, baik di bidang industri (pengolahan, produk olahan) maupun mesin untuk membajak sawah. Uang juga termasuk dalam pengertian modal produksi karena dengan uang menyebabkan mesin-mesin tersebut bisa menjalankan fungsinya, seperti pembelian bahan bakar, bahan baku untuk proses produksi barang, upah tenaga kerja, dan sebagainya. Setiap kebutuhan akan hasil produksi pertanian belum tentu mempunyai kesanggupan untuk menjalankan sebuah perusahaan, sehingga kemampuan (kompetensi) dan keahlian dalam mengelola perusahaan secara efisien dan menguntungkan merupakan salah satu faktor produksi.

Permasalahan sebuah sistem perekonomian yang telah banyak mengundang pendapat para ahli ekonomi, pada dasarnya dipandang dari sudut sistem perekonomian yang ada karena sebuah sistem perekonomian telah menciptakan permasalahan dalam perjalanannya. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tulisan ini untuk mengemukakan secara komprehensif berbagai kebijakan pemerintah terkait pemberdayaan dan peningkatan kompetensi masyarakat dan sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia dalam upaya mengentaskan dan mengatasi permasalahan perekonomian dan sistem produksi secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Dengan mereview berbagai kajian dan tulisan terkait sebagai materi untuk mengemukakan dan membahas perekonomian yang berdasarkan pada penyebab dan dapat menciptakan masalah pada perekonomian tanpa mempersoalkan sistem yang ada, dan diuraikan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan permasalahan ekonomi Indonesia dan mencari solusi melalui akselerasi pemberdayaan dan peningkatan kompetensi dalam sistem ekonomi tersebut.

METODE

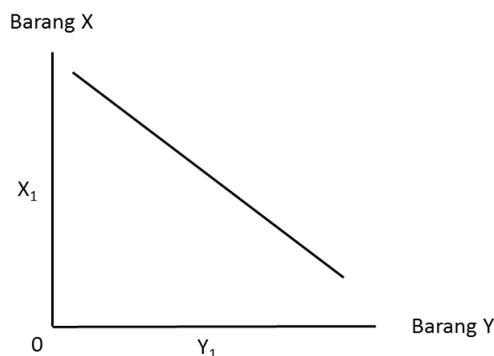
Ruang lingkup pembahasan dalam tulisan ini adalah ekonomi Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder. Konsep dan teori dijadikan landasan analisis secara deskriptif dan dipaparkan dalam bentuk narasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Perekonomian Di Indonesia

Pemilihan dan penentuan barang dan jasa yang akan diproduksi umumnya didasari dan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan yang ada dalam masyarakat atau sistem perekonomian. Salah satunya adalah: ketepatan dalam menentukan jenis hasil pertanian yang akan di produksi. Terbatasnya faktor-faktor produksi yang tersedia dalam sebuah perekonomian (masyarakat atau negara), menyebabkan harus dilakukannya suatu pilihan, suka atau tidak suka, untuk menggunakan faktor hasil produksi pertanian. Permasalahan perekonomian bila ditinjau dari sudut penggunaan faktor dari hasil pertanian di Indonesia, dapat terjadi akibat dari ketidaktepatan penggunaan faktor-faktor produksi yang ada dalam perekonomian.

Dalam hal pilihan yang harus dilakukan, akan menyebabkan pemenuhan atas faktor kebutuhan yang ada semata atau nilainya tidak akan dipenuhi dari faktor produksi yang telah dihasilkan. Dengan kata lain, dalam memenuhi kebutuhan untuk satu jenis produk oleh masyarakat, harus dapat mengorbankan kebutuhan-kebutuhan lainnya (opportunity cost) (Kallsen, 2005). Untuk dapat melihat secara jelas bagaimana masyarakat dalam sebuah sistem perekonomian menentukan pilihan guna memenuhi kebutuhannya, dipergunakan kurva kemungkinan produksi seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Kurva Kemungkinan Produksi

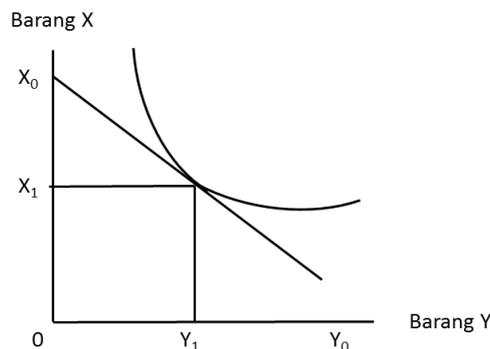
Kurva kemungkinan produksi, merupakan kombinasi hubungan antara jumlah barang hasil pertanian yang dapat diproduksi dan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam sebuah sistem perekonomian. Untuk dapat membuat kombinasi barang yang mungkin diproduksi dengan keterbatasan faktor produksi harus dapat dipenuhi asumsi-asumsinya sebagai berikut:

1. Faktor-faktor produksi yang dimiliki sudah bekerja secara penuh (*full capacity*)

2. Jumlah atau teknologi faktor produksi yang dimiliki tidak dapat diubah atau ditambah.

Dalam sistem perekonomian tersebut berlaku hukum hasil yang semakin berkurang (*the law deminishing of return*), yaitu sampai batas tertentu setiap penambahan tenaga kerja masih menambah hasil (output) tetapi setelah melewati tingkat tertentu penambahan tenaga kerja tidak meningkatkan produksi lagi. Dari berbagai kemungkinan kombinasi faktor produksi yang tersedia dalam sistem perekonomian untuk menghasilkan barang X atau barang Y. Kalau faktor produksi yang ada digunakan memproduksi barang X, maka masyarakat yang mengadakan pilihan tersebut tidak akan mendapatkan barang Y (hanya mendapatkan barang X sebesar OX_1). Bilamana masyarakat menginginkan barang Y sudah tentu tidak akan mendapat barang C (hanya mendapatkan barang Y sebesar OY_1).

Kombinasi produksi barang X dan Y mempunyai kemungkinan akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk kedua jenis barang tersebut. Kombinasi yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi tersebut sudah merupakan gambaran kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Akan tetapi, perlu diingatkan dari berbagai kemungkinan kombinasi produksi barang X dan Y pada prinsipnya selalu memberikan tingkat kepuasan yang sama, hal ini dapat diterangkan dengan kurva indifference pada Gambar 2.



Gambar 2. Indifference curve

Setiap kombinasi produksi barang X_1 dan Y_1 yang dihasilkan dari faktor-faktor produksi di atas akan selalu memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi masyarakat. Misalnya, kombinasi produksi barang X_1 dan Y_1 ditentukan pada titik (X_1 dan Y_1), atau titik B yaitu X_2 dan Y_2 pada kedua titik ini akan selalu memberikan kepuasan yang sama apapun pilihannya. Dengan kata lain, kombinasi produksi barang X dan Y yang mungkin dipilih oleh masyarakat adalah sepanjang garis X_0 dan Y_0 , tentu akan memberikan tingkat kepuasan yang sama.

Mempertinggi Efisiensi Penggunaan Faktor Produksi

Bila diamati dalam setiap sistem perekonomian akan terdapat atau bahkan selalu terjadinya kecenderungan ketidakefisienan pemakaian faktor produksi, yang akan lebih banyak terjadi di negara berkembang. Adanya keinginan kuat mengejar teknologi produksi yang tinggi, maka banyak investor menanamkan modalnya,

namun kenyataan yang dihadapi adalah lemahnya daya beli masyarakat, dan kualitas barang yang di hasilkan oleh negara berkembang masih rendah, sehingga sangat sulit menembus pasar ekspor. Kejadian tersebut menyebabkan terjadinya pengangguran kapasitas terpasang (kapasitas terpakai lebih kecil dari kapasitas terpasang).

Ketidakefisienan penggunaan faktor produksi yang terjadi dapat juga disebabkan oleh resesi ekonomi yang berkepanjangan atau resesi yang temporer. Khususnya di negara berkembang yang mengalami ketidakefisienan penggunaan faktor-faktor produksi, bisa juga di sebabkan kebijakan pemerintah yang mengadakan sistem skala prioritas pembangunan ekonomi secara selektif. Selain itu, dapat juga disebabkan oleh perencanaan ekonomi yang kurang matang sehingga terjadi pemusatan investasi pada sektor yang cukup potensial pada mulanya dan akhirnya sektor tersebut mengalami kejenuhan. Apabila ketidakefisienan penggunaan faktor produksi tidak dapat diatasi atau berlanjut terus maka akan terjadi pemborosan sumber daya nasional.

Tindakan yang perlu di lakukan dalam mengatasi ketidakefisienan penggunaan faktor-faktor produksi ini adalah:

- a. Akselerasi pelaksanaan berbagai kebijakan berpihak yang salah satunya adalah pemerataan dalam berbagai hal, meliputi pemerataan: pembangunan perekonomian di segala bidang dan sektor beserta sarana prasarana, keterbukaan akses informasi, pemasaran, infrastruktur dan kelembagaan yang terkait dengannya, pendidikan dan ketrampilan dan segala fasilitas terkait dengannya, pendapatan, kesempatan kerja dan berusaha, rasa aman, peluang dan kesempatan serta iklim yang kondusif untuk berinvestasi, dan akselerasi berbagai pelaksanaan program kebijakan lainnya.
- b. Membuat perencanaan pembangunan ekonomi yang terpadu dan menciptakan sektor prioritas yang telah direncanakan sampai batas tertentu sehingga tidak terjadi pemusatan investasi pada sektor industri yang menguntungkan saja.
- c. Menciptakan rencana pembangunan ekonomi yang padat karya atau padat pemakaian tenaga manusia, terutama untuk menyerap pengangguran, sehingga terjadi perbaikan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Akhirnya dapat menggerakkan roda perekonomian yang tumbuh secara dinamis.
- d. Berusaha meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan sehingga dapat bersaing di pasar internasional (global). Hal ini dengan sendirinya kapasitas faktor-faktor produksi yang tidak akan pernah di bawah kapasitas normal.

Bentuk dan Sistem Perekonomian

Untuk menentukan pilihan mengenai yang akan terjadi pada produksi, untuk siapa diproduksi, negara-negara akan mencari sistem ekonomi menurut selera (pendapat) agar dapat memberikan jawaban yang paling tepat, guna memecahkan persoalan ekonomi yang dihadapi oleh negara, bentuk ekonomi pasar, ekonomi komando (*model Uni Soviet sebelum bubar, RRC, Korea Utara*) ekonomi campuran. Seluruh sistem produksi dan sistem distribusi akan diarahkan guna mendukung dan mensukseskan

pilihan sistem ekonomi negara. Wujud pilihan sistem ekonomi harus tergambar dalam struktur perekonomian, kehidupan masyarakat yang mengadakan pilihan.

Ekonomi pasar akan selalu dikaitkan dengan ajaran kebebasan individu, yang ciri-ciri ekonomi pasar sangat menentang campur tangan pemerintah dalam mengatur perekonomian. Ekonomi komando didasarkan pada dasar ekonomi komando yang bersifat sosial. Ciri khas sistem ekonomi komando adalah campur tangan pemerintah dalam mengatur perekonomian melalui perencanaan ekonomi secara menyeluruh dan sejauh mungkin dihindarkan pemilikan modal oleh sektor swasta. Kedua sistem ini mempunyai kekuatan dan kelemahan secara sendiri-sendiri, dalam kenyataan dan praktiknya kedua sistem ini tidak pernah dilaksanakan secara murni. Baik dari kebebasan maupun ketidakbebasan individu secara total sangat bertentangan dengan harkat manusia secara mendasar. Oleh sebab itu, masing-masing negara dan masyarakat selalu mencari sistem ekonomi yang paling sesuai dengan kebutuhan.

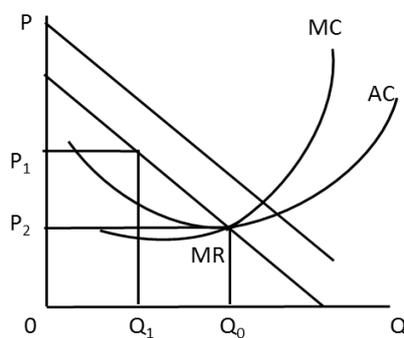
Mulia (1997) mengemukakan sistem ekonomi komando dan berbagai kelemahannya, dimana segala sesuatunya ditentukan negara termasuk apa, berapa, dan untuk siapa barang yang diproduksi sehingga akan merugikan masyarakat yang berkreativitas di dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi komando tidak sesuai dengan harkat hidup manusia, hal ini dibuktikan dengan runtuhnya ekonomi komando Uni Soviet, dan Eropa Timur. Kelemahan dalam sistem perekonomian dapat ditutupi oleh sistem perekonomian campuran dan hampir seluruh negara sudah menerapkan dalam perekonomian negaranya.

Kebebasan individu dalam sistem perekonomian campuran ini dijamin sepenuhnya, tetapi praktik monopoli harus dibatasi dan dihapuskan dalam struktur perekonomian untuk melindungi konsumen (Amerika yang dalam sistem perekonomian dikenal liberal masih melarang timbulnya monopoli berdasarkan Undang-Undang Anti *Trust*). Pemerintah hanya sebagai pengawas supaya tidak terjadi praktik-praktik yang merugikan masyarakat atau konsumen, sehingga campur tangan pemerintah dalam perekonomian jangan sampai merusak sistem produksi, distribusi, dan harga pasar.

Menentukan Sebab dan Cara Mengatasi Kenaikan Harga

Terjadinya kenaikan harga merupakan salah satu akibat dari ketidakefisienan penggunaan faktor produksi (tingginya biaya tetap yang diserap produk), sehingga merugikan petani dan masyarakat mayoritas yang berpenghasilan tetap. Dalam sistem perekonomian pasar kenaikan harga dapat disebabkan oleh adanya monopoli atau oligopoli atau campuran keduanya, yang juga akan menyebabkan inflasi (nilai riil rupiah mengalami penurunan) sehingga perlu dibuat peraturan (undang-undang) sebagai salah satu tindakan keberpihakan dan animo pemerintah terhadap masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan bahan pokok untuk hidup dan berkehidupan.

Kebebasan individu dalam melakukan tindakan ekonomi sehingga menimbulkan kecenderungan terciptanya monopoli atau oligopoli sistem ekonomi pasar merupakan salah satu kelemahan sistem perekonomian (Mulia, 1997). Dengan adanya monopoli akan merugikan konsumen atau masyarakat secara total karena keinginan konsumen dapat dikendalikan oleh produsen melalui pasar sehingga faktor-faktor produksi yang dimiliki produsen tidak akan bekerja semaksimal mungkin. Hal ini akan menciptakan penentuan harga secara sepihak tidak berdasarkan kekuatan penawaran dan permintaan, mengacu struktur permintaan dan alokasi sumber daya yang salah, serta timbulnya keuntungan-keuntungan monopoli yang tidak wajar. Kurva Gambar 4 merupakan persaingan tidak sempurna (monopoli), terlihat bahwa produsen mempunyai kebebasan menentukan.



Gambar 4. Bentuk Pasar Monopoli

Tingkat harga sepanjang garis AR, dengan kondisi kebebasan yang dimiliki oleh produsen, maka masyarakat akan mendapatkan barang sebesar $0Q_1$, sedangkan harga yang harus dibayarkan $0P_1$. Sebenarnya harga yang dikorbankan masyarakat $0P_2$ dan jumlah barang yang diperoleh pada tingkat harga tersebut adalah $0Q_2$. Dengan adanya monopoli, masyarakat dirugikan dari segi harga sebesar $1-P_2$, dan dari segi jumlah barang masyarakat dirugikan $1-Q_2$. Dalam sistem ekonomi pasar, masyarakat juga dapat dirugikan walaupun tidak monopolis atau oligopolis, karena sistem ekonomi pasar bila benar terjadi persaingan di antara produsen akan menguntungkan masyarakat sebagai konsumen dan harga di konsumen merupakan harga paling efisien.

Produsen tidak menginginkan persaingan, maka diadakan kerja sama antara produsen untuk mengkoordinasi keputusan penentuan tingkat *output* dan harga (kartel) sehingga kerja sama (kartel) di antara produsen sama-sama menghasilkan keuntungan monopoli (Mulia, 1997). Segi-segi negatif dengan adanya kartel dalam perekonomian, antara lain:

1. Keuntungan monopoli (*monopoly profil*) dapat dinikmati produsen dalam jangka panjang, akan menciptakan distribusi pendapatan yang tidak merata di antara golongan dalam masyarakat sehingga kartel sering dipandang menciptakan keadilan.

2. Tingkat volume karena anggota kartel tidak sepenuhnya memanfaatkan *economic of scale*, yang merupakan suatu tindakan pemborosan sumber daya.
3. Eksploitasi dilakukan produsen terhadap konsumen karena harga *output* lebih tinggi dari biaya marjinal, dan juga eksploitasi terhadap pemilik faktor produksi (tenaga kerja) lebih tinggi dari biaya marjinal, karena dibayar (biaya marginal) lebih rendah dari harga *output*.

Permasalahan Ekonomi Ditinjau Dari Kesejahteraan Masyarakat

Seluruh aktivasi ekonomi yang dilakukan suatu negara melalui pendirian badan usaha (Badan Usaha Milik Negara) adalah untuk mengatur perekonomian, dimana tujuan kebijaksanaan dimaksudkan guna peningkatan ekonomi dan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Peningkatan aktivasi perekonomian dalam skala nasional seperti peningkatan daya serap tenaga kerja akibat peningkatan investasi, peningkatan pendapatan masyarakat akibat adanya multiplier effect (angka pengganda) dan akselerasi pelaksanaannya, yang akan berdampak positif maupun negatif. Dampak negatif inilah yang menciptakan permasalahan dalam perekonomian yang terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat (Elizabeth, 2008). Adapun permasalahan ekonomi ditinjau dari kesejahteraan masyarakat, meliputi:

- **Pertumbuhan Ekonomi**

Mubyarto (1991) berpendapat bahwa gerak maju perekonomian suatu negara akan berpengaruh terhadap kemajuan kehidupan masyarakat sehingga suatu negara akan berusaha meningkatkan pertumbuhannya. Melalui berbagai kebijaksanaan, tanpa adanya suatu pertumbuhan perekonomian akan dapat dipastikan kehidupan masyarakat tidak akan beranjak dari kehidupan semula (kemiskinan) (Mulia, 1997). Berbagai cara yang ditempuh suatu negara guna memajukan pertumbuhannya, seperti: menawarkan kemudahan kepada investor asing (tax holiday), agar mau menanamkan modal di negara tersebut, mempromosikan tenaga kerja terpakai (applied employee) dan siap kerja dengan upah terjangkau, menciptakan iklim investasi dan persaingan yang sehat antar pengusaha untuk meningkatkan efisiensi, dan menyiapkan prasarana fisik secara baik (Elizabeth, 2016).

Akselerasi pelaksanaan industrialisasi dalam berbagai sektor merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mengejar dan memacu pertumbuhan ekonomi setinggi mungkin. Hal ini yang akan meningkatkan aktivitas perekonomian di masyarakat, akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.

- **Pertumbuhan Jumlah Penduduk**

Angka kelahiran yang tinggi, terutama di negara sedang berkembang, akan menciptakan beban pada pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, karena perekonomian dapat dikatakan berkembang bila pertumbuhan ekonomi lebih besar dari pertumbuhan jumlah penduduk. Sebagai contoh, tingkat pertumbuhan aktivitas perekonomian dinilai rill adalah 5% sedangkan kelahiran yang terjadi

4%, maka peningkatan kesejahteraan yang diraih oleh negara tersebut adalah 1%. Pertumbuhan suatu perekonomian yang tidak terlalu tinggi tidak bisa diharapkan mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat, bila tingkat kelahiran tidak bisa ditekan sekecil mungkin, sehingga segala upaya pemerintah untuk menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak akan berarti banyak. Berbagai cara telah dilakukan untuk menekan angka kelahiran, seperti program keluarga berencana dan menetapkan batas usia perkawinan.

- **Distribusi Pendapatan**

Distribusi pendapatan antar golongan masyarakat tidak selalu sama dengan distribusi yang ideal, dan pada kenyataannya tidak terjadi distribusi pendapatan yang ideal dan merata dalam sebuah sistem perekonomian apapun. Ketimpangan distribusi pendapatan pada sebuah sistem perekonomian (khususnya negara berkembang), lebih disebabkan oleh kebijaksanaan pemerintah negara itu sendiri. Pemerintah sebagai pengelola yang dominan (bila dapat dikatakan tunggal) dalam perekonomian dapat mengambil dua kebijakan sebagai titik sentral pertumbuhan ekonomi. Tujuan yang hendak dicapai dalam perekonomian sangat mempengaruhi pemerintah dalam melakukan berbagai langkah dan tindakan ekonomi, seperti:

- (i) **Mengejar Pertumbuhan Ekonomi**

Untuk dapat mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mewujudkan tujuan segala kebijakan pemerintah diarahkan pada sekitaran industrialisasi (Elizabeth. 2011), yang sisi positifnya adalah dicapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga menyisakan sisi negatif dimana akan timbul kesenjangan distribusi bahwa ketimpangan ini hanya bersifat sementara, dimana pada akhirnya, akan dapat diciptakan distribusi pendapatan lebih merata dengan terjadinya penetasan ke bawah (*trickle down effect*). Dari pendapatan tinggi ke pendapatan menengah, dari pendapatan menengah ke pendapatan rendah.

Harapan tersebut didasari pertimbangan bahwa pertumbuhan ekonomi yang hanya menitikberatkan pada sektor industrialisasi, tidak akan dapat menjaga kesinambungan pertumbuhan tersebut. Hal tersebut terjadi karena relatif sangat rendahnya daya beli dari mayoritas masyarakat yang berpenghasilan kecil (akibat ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan) yang mengakibatkan berbagai sektor industri tidak dapat bekerja pada kapasitas normal (terjadi inefisiensi). Berkurang dan rendahnya daya beli masyarakat lama kelamaan akan menimbulkan stagnasi (kelesuhan) perekonomian, akhirnya yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang pada awalnya tinggi akan menurun kembali (*the law deminishing of return*).

- (ii) **Menciptakan Pemerataan Pendapatan**

Pada konsep pembangunan yang mengarah pada pemerataan pendapatan lebih memungkinkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih

tinggi pada masa yang akan datang. Dalam konsep pertumbuhan ekonomi, agar pembangunan ekonomi melalui pertumbuhan dapat dinikmati masyarakat secara keseluruhan, yang diusahakan adalah pemerataan pendapatan melalui pembangunan ekonomi. Untuk itu, kebijakan yang diambil pemerintah selalu dikaitkan dan dengan kepentingan golongan masyarakat mayoritas. Sektor pertanian diprioritaskan sebagai titik sentral dalam mengejar pertumbuhan ekonomi yang menciptakan pemasaran, khususnya negara berkembang yang sebagian besar masyarakatnya masih berusaha di sektor agraris.

Meskipun dengan titik sentral pembangunan sektor pertanian, maka pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak begitu tinggi, namun dari sisi pemerataan pendapatan diprediksi dapat lebih adil atau merata, dan menyebabkan daya beli masyarakat lebih baik dibanding dengan konsep mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan daya beli masyarakat yang lebih baik, maka seluruh barang yang dihasilkan oleh sektor industri dapat diserap pasar yang tersedia, sehingga akan dapat memacu sektor industri meningkatkan aktivitasnya. Industrialisasi akan berhasil bila daya beli masyarakat memungkinkan menyerap seluruh produksi bidang industri. Dengan demikian, pilihan konsep yang dijalankan oleh suatu negara, antara mengejar pertumbuhan yang tinggi atau mengejar pemerataan distribusi pendapatan antar berbagai golongan masyarakat, sangat tergantung pada tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan perekonomian.

Permasalahan Ekonomi Ditinjau Dari Masalah Teknologi

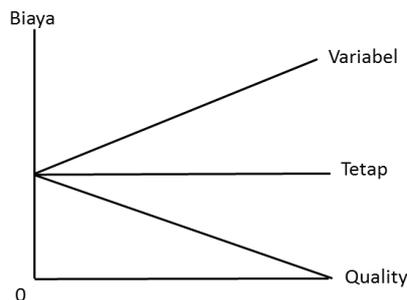
Di berbagai negara maju, ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadi suatu kesatuan dengan proses pembangunan hampir di segala bidang (Bustanul, 2004). Berbagai metoda, inovasi dan terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk di bidang produksi pertanian, sudah menjadi agenda rutin para ilmuwan, praktisi dan peneliti. Negara yang memiliki kekayaan sumberdaya alam yang berlimpah, akan tetap terbelakang bila negara tersebut tidak memiliki kesanggupan teknologi dan keterampilan untuk mengolahnya. Yang menjadi permasalahan penting di negara ketiga (negara sedang berkembang), tak terkecuali Indonesia, adalah bahwa tingkat aplikasi dan penguasaan teknologi bidang pertanian masih cukup rendah, sehingga tidaklah mengherankan apabila inovasi baru jarang sekali yang berasal dari negara ketiga.

Kondisi tersebut salah satunya dapat terlihat dari masih relatif sangat rendahnya anggaran dana penelitian untuk sektor pertanian, yaitu di bawah 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Teknologi merupakan hasil dari seluruh kemampuan dan pengetahuan, dan kemampuan mengaplikasikannya ke dalam proses produksi barang dan jasa, untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan untuk hidup dan berkehidupan. Kemampuan dalam berteknologi, khususnya bagi negara berkembang, dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kompetensi tenaga kerja untuk menjadi applied employee dan trampil dengan

program terpadu melalui pengkajian teknologi serta penelitian secara mendalam dan berkesinambungan serta berkelanjutan (Elizabeth, 2016). Kepemilikan teknologi harus diusahakan setiap negara untuk lebih mampu menggali dan memanfaatkan sumberdaya alam dan menggerakkan aktivitas perekonomian untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Penentuan Tingkat Teknologi Ditinjau Kebutuhan Konsumsi Pertanian

Suatu produk barang hasil pertanian maupun jasa yang dihasilkan ditempuh berbagai cara mulai dari pengguna teknologi yang paling sederhana hingga canggih untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Penentuan teknologi produksi untuk menghasilkan produksi hasil pertanian untuk masyarakat akan mempengaruhi tingkat harga produksi, terutama bila dipergunakan peralatan canggih dan efisien (dengan asumsi tidak ada pemborosan pemakaian tenaga kerja dan bahan baku). Bila permintaan masyarakat nyata lebih kecil dari kemampuan maksimal peralatan canggih tersebut, akan menyebabkan tingginya ongkos yang dikorbankan, dan harga barang akan lebih mahal bila dibandingkan dengan memakai teknologi sederhana, karena biaya variabel yang diserap setiap unit produksi, akan selalu sebanding setiap penambahan unit produksi. Dengan permintaan nyata dalam masyarakat yang kecil, biaya yang diserap setiap unit produksi jelas akan semakin besar. Besarnya komponen biaya yang diserap produk dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. $Fixed\ cost/Total\ output = biaya\ tetap/unit$

Penawaran tenaga kerja di negara berkembang juga sangat mempengaruhi penggunaan teknologi yang ada. Penawaran tenaga kerja di negara berkembang khususnya negara miskin yang bertumpu pada sektor agraris, diprediksi penggunaan teknologi pertanian modern akan menyebabkan berkembangnya pengangguran; dimana dalam masyarakat yang masih bersifat agraris (negara berkembang) telah banyak pengangguran tersembunyi pada sektor pertanian. Seperti dikemukakan Bustanul (2004), bahwa pada sistem perekonomian kualitas tenaga kerja faktor sangat mempengaruhi penggunaan teknologi tinggi. Hal tersebut juga terkait dengan upaya meningkatkan hasil produksi pertanian yang tidak hanya ditentukan oleh faktor teknologi melainkan juga ditentukan oleh faktor sosial budaya masyarakat setempat (Basuno, 2005).

Realokasi industri dari negara maju ke negara berkembang yang menjadi trend sekarang ini, tidaklah memakai teknologi canggih untuk ukuran sekarang,

melainkan dengan menggunakan teknologi tahun 1970-an. Pada negara berkembang, dengan tingkat ketrampilan dan adopsi teknologi yang relatif masih rendah, sehingga pemilihan teknologi untuk proses produksi adalah tingkat menengah.

Permasalahan Ekonomi Ditinjau Dari Sisi Moneter

Agar laju pertumbuhan perekonomian lancar dan berimbang, banyak faktor yang harus dikendalikan pemerintah, sehingga jangan sampai karena terlalu mengejar pertumbuhan ekonomi, berbagai permasalahan kemasyarakatan dan lingkungan hidup lainnya menjadi terlupakan oleh perencana dan pelaku ekonomi dan pembangunan. Faktor-faktor permasalahan perekonomian dalam pertumbuhannya hingga saat ini sudah semakin beragam dan kompleks yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Beberapa faktor yang perlu dikendalikan dalam mengejar pertumbuhan perekonomian dari sisi moneter, yaitu:

• Inflasi Dan Kebijakan Moneter

Inflasi merupakan momok bagi setiap perencana ekonomi pada perekonomian suatu negara sehingga diperlukan berbagai kebijakan moneter untuk dapat menekan inflasi. Salah satu tindakan klasik yang diambil dalam mengatasi inflasi ini adalah dengan mengendalikan tingkat dan mata uang yang beredar. Bilamana tingkat uang yang beredar lebih tinggi dibandingkan pendapatan nasional suatu negara pada periode tertentu, akan menyebabkan terjadinya inflasi di atas tingkat yang wajar (Anwar. 1990). Suatu negara yang dalam kondisi inflasi di atas wajar, memang akan menciptakan aktivitas perekonomian yang tinggi, dan bila ditinjau dari pertumbuhan ekonomi kondisi tersebut sangat menguntungkan, tetapi beban yang ditanggung masyarakat juga akan meningkat seiring naiknya tingkat inflasi. Harga-harga kebutuhan masyarakat meningkat, namun nilai riil uang yang dimiliki masyarakat malah menurun.

Kebijakan pemerintah menghadapi situasi perekonomian dalam kondisi inflasi di luar kendali adalah melalui perbankan Bank Sentral pemerintah dengan melakukan berbagai tindakan guna menarik uang yang beredar di masyarakat. Kalau tingkat uang yang beredar lebih rendah dari kebutuhan aktivitas perekonomian (uang yang beredar lebih kecil dari output nasional), akan menyebabkan terjadinya deflasi (nilai uang berada di atas nilai riilnya). Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena aktivitas perekonomian akan tertekan dan akhirnya pertumbuhan ekonomi juga mengalami stagnasi (Ashari, 2009). Dari uraian tersebut peran strategis sektor perbankan sebagai indikator pembangunan perekonomian tergambar secara jelas, bahwa perbankan memiliki potensi yang sangat besar sebagai pembiayaan perekonomian di segala bidang termasuk sektor pertanian.

• Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi melalui Tingkat Suku Bunga Terjangkau

Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi suatu negara diperlakukan tingkat investasi yang tinggi, yang sangat dipengaruhi tingkat suku bunga dan kestabilan perekonomian. Tingkat suku bunga yang tinggi akan menekan tingkat investasi

yang dibutuhkan. Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi diperlukan tingkat suku bunga yang rendah untuk merangsang investor, dan diharapkan akan dapat menembus stagnasi pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, kestabilan perekonomian dan politik sangat menentukan tingkat investasi, karena tanpa kestabilan politik para investor (PMA dan PMDN) akan takut menanggung risiko yang mungkin terjadi.

PENUTUP

Pada konsep kebijakan pemerintah dalam pembangunan pertanian dan teknologi guna memenuhi kebutuhan konsumen yang mengarah pada pemerataan pendapatan lebih memungkinkan guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada masa yang akan datang. Membuat perencanaan pembangunan ekonomi yang terpadu dan menciptakan sektor prioritas yang telah di rencanakan sampai batas tertentu sehingga tidak terjadi pemusatan investasi pada sektor industri yang menguntungkan saja.

Pembangunan ekonomi yang padat karya atau padat pemakaian tenaga manusia, sehingga terjadi perbaikan daya beli masyarakat secara keseluruhan, dan dapat menggerakkan roda perekonomian yang tumbuh secara dinamis serta dapat meningkatkan kualitas produk yang di hasilkan sehingga dapat bersaing di pasar internasional. Dengan sendirinya kapasitas faktor-faktor produksi yang tidak akan pernah di bawah kapasitas normal. Sektor pertanian diprioritaskan sebagai titik sentral dalam mengejar pertumbuhan ekonomi yang menciptakan pemasaran, khususnya negara berkembang yang sebagian besar masyarakatnya masih berusaha di sektor agraris.

Kebijakan pemerintah yang telah dijalankan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi dengan melakukan industrialisasi dan pengembangan di berbagai sektor. Industrialisasi akan berhasil bila daya beli masyarakat memungkinkan menyerap seluruh produksi bidang industri. Meskipun dengan titik sentral pembangunan sektor pertanian, pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak begitu tinggi, namun dari sisi pemerataan pendapatan diprediksi dapat lebih adil atau merata, dan menyebabkan daya beli masyarakat lebih baik dibandingkan dari konsep mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Dengan daya beli masyarakat yang lebih baik akan dapat memacu sektor industri meningkatkan aktivitasnya, seluruh barang yang dihasilkan oleh sektor industri dapat diserap pasar yang tersedia. Karena itu, sektor pertanianlah yang mendapat perhatian terlebih dahulu sebelum mencurahkan segala sumber daya untuk mengadakan industrialisasi.

Dengan terciptanya industrialisasi, maka pertumbuhan ekonomi dapat dipacu untuk meningkatkan aktivitas perekonomian di masyarakat, yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Jadi, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perlu dipersiapkan landasan yang kokoh melalui

pemerataan pendapatan di antara golongan penerima pendapatan dalam masyarakat.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

- Perekonomian di suatu negara akan berpengaruh terhadap kemajuan kehidupan masyarakat sehingga Indonesia akan berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonominya.
- Melalui berbagai kebijakan pemerintah sehingga dapat di tempuh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, dengan cara menawarkan kemudahan kepada investor asing agar dapat menanamkan modal usahanya (*tax holiday*), mempromosikan tenaga kerja terpakai (*applied employee*) dan siap kerja dengan upah terjangkau, menciptakan persaingan yang sehat antara pengusaha untuk meningkatkan efisiensi, menciptakan iklim investasi yang baik, dan menyiapkan prasarana fisik secara baik.
- Kebijakan pemerintah yang telah di jalankan dalam mengejar dan memacu pertumbuhan ekonomi berbagai sektor dan dengan melakukan industrialisasi sehingga dengan terciptanya industrialisasi, sehingga akan meningkatkan aktivitas perekonomian di masyarakat, yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- Pada konsep kebijakan pemerintah dalam pembangunan pertanian dan teknologi guna memenuhi kebutuhan konsumen yang mengarah pada pemerataan pendapatan lebih memungkinkan guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada masa yang akan datang.
- Membuat perencanaan pembangunan ekonomi yang terpadu dan menciptakan sektor prioritas yang telah di rencanakan sampai batas tertentu sehingga tidak terjadi pemusatan investasi pada sektor industri yang menguntungkan saja.
- Pembangunan ekonomi yang padat karya atau padat pemakaian tenaga manusia, sehingga terjadi perbaikan daya beli masyarakat secara keseluruhan, dan dapat menggerakkan roda perekonomian yang tumbuh secara dinamis serta dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan sehingga dapat bersaing di pasar internasional. Dengan sendirinya kapasitas faktor-faktor produksi yang tidak akan pernah di bawah kapasitas normal.
- Menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui tingkat suku bunga terjangkau.
- Diperlukan peran aktif pemerintah dan masyarakat pada khususnya terkait serta instansi dan *stakeholder* terkait lainnya pada umumnya, untuk mencapai pemberdayaan dan peningkatan kompetensi masyarakat dan para pelaku ekonomi terkait lainnya dalam mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia.
- Perlunya akselerasi pelaksanaan berbagai kebijakan berpihak yang salah satunya adalah pemerataan dalam berbagai hal, meliputi pemerataan: pembangunan perekonomian di segala bidang dan sektor beserta sarana prasarana, keterbukaan akses informasi, pemasaran, infrastruktur dan kelembagaan yang terkait dengannya, pendidikan dan ketrampilan dan segala fasilitas terkait dengannya, pendapatan, kesempatan kerja dan berusaha, rasa aman, peluang dan kesempatan

serta iklim yang kondusif untuk berinvestasi, dan akselerasi berbagai pelaksanaan program kebijakan lainnya.

- Perlunya pelaksanaan akselerasi pemberdayaan dan peningkatan kompetensi dalam sistem produksi untuk mengatasi permasalahan perekonomian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar N. 1990. *Tinjauan Ekonomi Atas Dampak Deregulasi pada Sistem Keuangan Indonesia*. Gramedia. Jakarta.
- Ashari. 2009. *Peran Perbankan Nasional dalam Pembiayaan Sektor Pertanian di Indonesia Forum Agro Ekonomi*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. FAE. Vol. 27. No.1. Juli 2009. Hal. 13-27
- Basuno E. M. Sofyan dan Chairul M. 2005. *Strategi Pemanfaatan Sawah Bukan Baru. Analisis Kebijakan Pertanian*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Vo.4. No. 3, September 2005.
- Bustanul. 2004. *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Jakarta. Penerbit Buku Kompas 2004.
- Elizabeth, R. 2016. *Pemberdayaan Petani Dalam Pengelolaan Tanaman Dan Ternak Guna Meningkatkan Kesejahteraan Petani*. Prosiding Seminar Nasional Agustus 2016. BPTP Sulawesi Utara. Manado. Badan Litbang Pertanian. Sekretaris Jenderal Pertanian. Kementerian Pertanian.
- Elizabeth. R. 2014. *Mewujudkan Kemandirian Dan Ketahanan Pangan Melalui Revitalisasi Dan Pengembangan Infrastruktur Pertanian*. Konferensi Nasional XVII dan Kongres XVI PERHEPI. IPB International Convention Center (IICC). Bogor. 28-29 Agustus 2014.
- Elizabeth, R. 2011. *Strategi Pencapaian Diversifikasi Dan Kemandirian Pangan: Antara Harapan Dan Kenyataan*. Jurnal IPTEK Des. 2011. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Bogor. Badan Litbang Pertanian. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Elizabeth, R. 2008. *Penguatan dan Pemberdayaan Peran Pembangunan Perekonomian, Sistem Pasar dan Kelembagaan: Dilema Dilema Kemiskinan dan Kelaparan di Perdesaan*. Prosiding Seminar Nasional: "Akselerasi Inovasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi Mendukung Ketahanan Pangan di Wilayah Kepulauan." BPTP Maluku Ambon, 29-30 Oktober 2007. BPTP Maluku Ambon. Balitbang. Departemen Pertanian. 2008.
- IGAK. Sudaratmaja dan M.Fagi. 2005. *Evaluasi Pengelolaan Integrasi Tanaman-Ternak. Integrasi Tanaman-Ternak*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Hal. 36-51.
- Kallsen. C. 2005. *What is Sustainable Agriculture and How We Do it? Better Crops*, Vol. 89 N0.1. 2005.
- Mubyarto. 1991. *Sistim dan Moral Ekonomi Indonesia*, LP3ES. 1991.
- Mulia. N, 1997. *Teori Ekonomi Mikro*. Pendekatan pada Perekonomian Indonesia. Penerbit Djambatan. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Jakarta 1997.